

Komunikasi Pemerintah Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internal Marga Lewo Muda Di Desa Kolipetung Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

Abdul Rahim

abdullrahimm14@gmail.com
Universitas Muslim Indonesia

Hadawiah

Hadawiah.hadawiah@umi.ac.id
Universitas Muslim Indonesia

Muhammad Idris

Muhammad.idris@umi.ac.id
Universitas Muslim Indonesia

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui proses komunikasi pemerintah Desa Kolipetung Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internal Marga Lewo Muda di Desa Kolipetung, Kec. Adonara. 2). Dan untuk mengetahui faktor penyebab konflik internal marga Lewo Muda di Desa Kolipetung, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur.. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskripsi serta menggunakan metode analisis menggunakan Teori Konflik Thomas Hobbes, Teori Konflik Karl Marx dan menggunakan teori pendekatan teori Birokrasi Max Weber dan Teori Dialogisme Bakhtin.

Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik internal Marga Lewo Muda di Desa Kolipetung di karenakan adanya perbedaan-perbedaan perspektif dan interpretasi terhadap sejarah.

Dinamika sosial khususnya terjadi di internal marga Mewo Muda mengharuskan adanya pandangan utama dari pemerintahan desa Kolipetung. Secara konseptual pemerintah desa berkewajiban untuk memupuk kehidupan harmonis masyarakat desa serta meleraikan konflik yang ada demi tujuan keutuhan negara republik indonesia. Konsepsi pemerintahan desa Kolipetung dapat dikatakan selaras dengan komunikasi pemerintahan berdasarkan teori Birokrasi Max Weber dan Dialogisme Bakhtin.

Kata Kunci: Komunikasi pemerintah, Konflik Internal, Marga Lewo Muda, Desa Kolipetung.

Abstract : *This research aims to 1). To find out the communication process of the Kolipetung Village Government in the Process of Resolving the Internal Conflict of the Lewo Muda Clan in Kolipetung Village, Kec. Adonara. 2). And to find out the factors causing the internal conflict of the Lewo Muda clan in Kolipetung Village, Adonara District, East Flores Regency. This study uses descriptive qualitative research and uses analytical methods using Thomas Hobbes' Conflict Theory, Karl Marx's Conflict Theory and using Max Weber's bureaucratic theory approach. and Bakhtin's Theory of Dialogism. The results of this study indicate that the factors that triggered the internal conflicts of the Lewo Muda clan in Kolipetung Village were due to differences in perspectives and interpretations of history.*

Social dynamics, especially in the internal Mewo Muda clan, require the main view of the Kolipetung village administration. Conceptually the village government is obliged to foster the harmonious life of the village community and resolve existing conflicts for the purpose of the integrity of the Republic of

Indonesia. The conception of Kolipetung village government can be said to be in harmony with government communication based on Max Weber's Bureaucracy theory and Bakhtin Dialogism.

Keywords : Government communications, Internal Conflict, Marga Lewo Muda, Kolipetung Village.

PENDAHULUAN

Kolipetung adalah salah satu dari delapan desa yang berada di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah 2,21 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 449 jiwa dan semua penduduknya beragama islam. Sebagian besar masyarakat Kolipetung berprofesi sebagai petani dengan hasil pertanian utama ialah kemiri, kopra olahan kelapa, vanili dan lain-lain.

Dalam sistem silsilah atau garis keturunan masyarakat Flores Timur pada umumnya, dan Adonara pada khususnya cenderung patrilineal, yang artinya sistem kekerabatan yang dirunut berdasarkan garis keturunan ayah. Garis kekerabatan di Adonara diruntut dari marga yang paling tinggi. Di bawa marga kita kenal dengan "*Manuk One Tou*", kemudian *Ama Tou* atausatu ayah.

Di desa Kolipetung sendiri terdapat beberapa marga antara lain, *Lewo Muda* yang merupakan suku atau marga asli yang bertempat di Desa Kolilanang dan Kolipetung, marga *Lakonawa*, *Tapo Bali*, *Lewo Gete*, *Horo Wurra*, dan *Wainira* yang hampir tersebar di setiap Desa di pulau Adonara. Keturunan atau nenek moyang marga *Lewo Muda* berasal dari lima bersaudara antara lain, Sanga Koli, Dosi Koli, Payong Bane, Ara Kian koli, dan Ola Suban.

Di antara kelima bersaudara tersebut, yang tidak memiliki keturunan atau dalam lisan adat disebut sebagai *Kenephong* adalah Sanga Koli, dan Dosi Koli yang merupakan anak ke dua yang hanya memiliki tiga anak perempuan. Berdasarkan sistem patrilineal maka hak waris hanya akan diturunkan kepada anak laki-laki, entah itu berupah warisan materil (tanah dan benda pusaka lainnya) maupun berupah hak dalam suatu sistem pemerintahan adat.

Secara teritorialial *lewo* (kampung) atau yang menjadi kriteria *lewo* adalah memiliki benda-benda seperti *Nuba Nara* (perkampungan awal atau asli), *Nobo Namang* (bebatuan menhir sebagai tempat duduk tetua adat beserta halaman kecil tempat musyawara), dan *Kokar Bale* atau *Lango Bele* (rumah adat) yang semuanya berada di desa Kolilanang. Awalnya kolipetung adalah *Oring*, dalam bahasa indonesia di artikan sebagai pondok. Oring untuk masyarakat Lamahot, Flores Timur, dijadikan sebagai tempat istirahat di kebun usai bekerja, bisa juga dijadikan sebagai tempat pertemuan dan diskusi, juga acara- acara adat tertentu. Orang pertama yang tinggal di tempat tersebut adalah Ola Subang yang merupakan *tuho wutung* (anak bungsu) dengan dua orang yang bermarga Tapo Bali dan Lakonawa.

Terlepas dari pada gambaran singkat di atas, rupanya masih ada konflik atau persaoalan yang belum dapat terselesaikan. Konflik internal yang terjadi di marga *Lewo Muda* umumnya terjadi karena perbedaan pandangan dalam proses pelaksanaan adat, perbedaan persepsi tentang sejara, kebiasaan dan nilai-nilai kebudayaan yang masih berlanjut hingga hari ini. Masalah klasik yang hampir terjadi di semua suku atau marga di Flores Timur. Perbedaan pandangan ini diyakini dapat menjadi bibit yang dapat merusak dan meruntuhkan keharmonisan bermasyarakat dan bisa sewaktu-waktu akan muncul dan berpotensi menebar aroma kecurigaan, prasangka juga sentimen. Hal ini perluh dan segera diselesaikan agar tidak menjamur ke anak cucu.

Dalam kehidupan bermasyarakat, dinamika atau gesekan yang terjadi akibat kelas sosial dalam lingkungan bermasyarakat sering terjadi, khususnya Indonesia, hal ini di karenakan pandangan demokrasi dan keragaman. Dinamika itu dikenal dengan istilah.

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lain. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya perbedaan ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, agama dan lain sebagainya. Dengan dibawasertainya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat.

Salah satu cara mengatasi konflik adalah dengan komunikasi. Komunikasi tidak hanya bisa dipandang sebagai pelengkap dalam interaksi sosial manusia. Bahkan lebih dari itu bahwa komunikasi menjadi elemen penting dalam setiap pola tindakan individu dalam kaitannya sebagai makhluk sosial. Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan hubungan kemanusiaan diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. Melalui komunikasi manusia dapat membangun hubungan yang baik sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat.

Dalam islam sendiri komunikasi dianggap sebagai fitrah manusia. Manusia telah Allah lebihkan dari makhluk lainnya dalam segi komunikasi, dalam Al-Quran hal itu dijelaskan dengan kata "*al-bayan*" (pandai berbicara) yang terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4. Asy Syaikani dalam tafsir Fath Al-Qodir mengartikan *al-bayan* sebagai kemampuan berkomunikasi. Dengan kemampuan tersebut manusia menjadi makhluk yang dinamis dan terus berkembang. Dalam perspektif Islam komunikasi dilakukan sebagai upaya mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah SWT melalui ibadah fardhu seperti sholat dan lain sebagainya. Di sisi yang lain komunikasi dilakukan untuk membangun hubungan horisontal yaitu hubungan sesama manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membagi desa menjadi dua macam, desa dan desa adat. Pemerintahan yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang merupakan arti dari desa. Sedangkan desa adat adalah fungsi dalam menjalankan wewenangnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Jadi, sesungguhnya penetapan sebuah desa merupakan desa adat telah dilegitimasi, baik berdasarkan undang-undang maupun hak asal usul adalah perlu untuk diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Menurut Koesoemahatmadja, desa sebagai bentuk asli dari masyarakat tempat tinggal bersama yang merupakan *face to face group*, yang memiliki persatuan diantaranya sekeluarga atau seketurunan dan lain sebagainya. Jadi, desa merupakan sebuah perangkat yang dibentuk berdasarkan konsepsi undang-undang yang menyelaraskan dengan aspek tradisional dan budaya masyarakat.

Sejalan dengan permasalahan di atas, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Uci Zahrafani, Dr. M. Jamal Amin, M.Si, Dr. Anwar As, S.S.sos, MM menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menunjukkan bahwa konflik antar suku sering kali terjadi karena adanya kecemburuan sosial dan ketersinggungan juga beberapa faktor seperti faktor perubahan sosial,

ekonomi, dan budaya. Untuk itu pemerintah juga harus turut membantu menyelesaikan permasalahan dengan cara menggunakan cara pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan mengikat.

Konflik Antar Saudara Kandung (Studi Kasus Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone) tahun 2021 yang diteliti oleh Hajerawati dan Muhammad Syukur Selaku Siswa Program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas negeri Makassar (2021). Menggunakan metode penelitian kualitatif, Menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik antar saudara kandung terdiri atas, anak, pendidikan

keluarga dan kebutuhan. peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik dengan menggunakan mediasi.

Pemerintah Adat dan Konflik Internal di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah (2022), yang diteliti oleh Marthin Riruma, Tonny D. Pariela, Syane Matatula, Dominggus E. B. Saijua (Pascasarjana Program Studi Sosiologi Universitas Pattimura). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dan menunjukkan bahwa masyarakat sebagai negeri adat maka Titawai juga mengenal sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang raja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fakta-fakta mengenai komunikasi pemerintah desa dalam proses penyelesaian konflik marga di desa Kolipetung, kecamatan Adonara..

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. komunikasi pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik marga di Desa Kolipetung, kecamatan Adonara, kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara objektif. Waktu penelitian ini akan berlangsung dua bulan, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023. Tempat penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan di desa Kolipetung, kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Data Primer, sumber data utama atau data primer dapat diperoleh langsung dari setiap informan yang diamati atau diwawancarai di lokasi penelitian, dalam hal ini setiap lembaga, organisasi dan individu yang terlibat aktif dalam desa Kolipetung.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan atau informasi yang telah ada sebelumnya dan yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data dapat berupa buku, internet, dan data statistik yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Desa Kolipetung

Desa Kolipetung merupakan salah satu desa dari delapan desa di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk desa Kolipetung adalah 681 jiwa dengan 331 penduduk laki-laki dan 350 penduduk perempuan, dengan total KK (Kepala Keluarga) 176 KK. Kolipetung memiliki batasan wilayah dengan desa Kolilang sebelah utara, Kecamatan Adonara Timur sebelah selatan, Kecamatan Kelubagolit sebelah timur, dan Desa Tikatukang sebelah barat. Adapun mata pencaharian warga desa pada umumnya adalah petani. Desa Kolipetung sekarang ini terdiri dari dua dusun yaitu, dusun satu Liko Lewo dan dusun dua Lapak Tana.

Secara geografis desa Kolipetung berada pada punggung perbukitan wilayah Koli yang memanjang dari arah utara ke selatan pada ketinggian 432 MDPL, antara 08⁰ LS dan 123⁰ BT. Desa Kolipetung terletak dibagian paling selatan wilayah kecamatan Adonara, dengan luas wilayahnya adalah 42 KM². Jarak dari ibukota kecamatan Adonara ke desa Kolipetung sekitar 8 KM.

2. Pemerintah Desa Kolipetung

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab VI tentang

Hak Dan Kewajiban Desa, Pasal 67 ayat (2) a : Melindungi dan menjaga persatuan, Kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI. Dikarenakan UUD dan Pancasila sebagai pedoman hidup kelompok masyarakat serta landasan dasar dari kinerja pemerintahan secara spesifiknya pemerintahan Desa Kolipetung. Terkait dalam hal ini mengacu pada bunyi undang-undang di atas maka segala konflik yang terjadi dalam desa tidak akan lepas dari ikut campur pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan kewajiban dari pemerintahan desa untuk mewujudkan keharmonisan hidup masyarakat desa khususnya masyarakat desa Kolipetung.

3. Marga Lewo Muda

Marga sendiri disebut sebagai suku bagi masyarakat Lamaholot- Adonara. Lewo Muda adalah salah satu marga yang berada di desa Kolipetung yang merupakan satu struktur hierarki hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Marga Lewo Muda merupakan sesuatu unit yang memiliki sistem kekuasaan tradisional yang berada di Kolipetung dalam sistem pemerintahan. Dengan ini eksistensi marga lewo muda memegang hak perintah secara kultural yang diwariskan secara turun temurun dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat Kolipetung yang sudah disakralkan sesuai dalam pandangan Max Weber. Artinya marga lewo muda tentu memiliki fungsi sebagai *Self Goferning Community* yakni sebuah komunitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri. Lewo muda dikatakan sebagai marga dikarenakan eksistensi genealogi atau silsilah serta memiliki basis teritorial dan memiliki sejarah yang panjang. Yang dimaksud dengan mengacu dari genealogi konsepsi kekerabatan atau silsilah yang merupakan hubungan darah atau hubungan perkawinan dan keturunan. Marga lewo muda bukan hanya mengatur tentang sistem kekuasaan tradisional namun hal itu juga berlaku pada hukum adat.

Dalam sistem silsilah atau garis keturunan masyarakat Flores Timur pada umumnya, dan Adonara pada khususnya cenderung patrilineal, yang artinya sistem kekerabatan yang diruntut berdasarkan garis keturunan ayah. Garis kekerabatan di Adonara diruntut dari marga yang paling tinggi. Di bawa marga kita kenal dengan "*Manuk One Tou*", kemudian *Ama Tou* atau satu ayah.

Di desa Kolipetung sendiri terdapat beberapa marga antara lain, *Lewo Muda* yang merupakan suku atau marga asli yang bertempat di Desa Kolipetung, marga *Lakonawa*, *Tapo Bali*, *Lewo Gete*, *Horo Wurra*, dan *Wainira* yang hampir tersebar di setiap Desa di pulau Adonara. Keturunan atau nenek moyang marga *Lewo Muda* berasal dari lima bersaudara antara lain, Sanga Koli, Dosi Koli, Payong Bane, Ara Kian koli, dan Ola Suban.

Di antara kelima bersaudara tersebut, yang tidak memiliki keturunan atau dalam lisan adat disebut sebagai *Kenephong* ialah Sanga Koli, dan Dosi Koli yang merupakan anak ke dua yang hanya memiliki tiga anak perempuan. Berdasarkan sistem patrilineal maka hak waris hanya akan diturunkan kepada anak laki-laki, entah itu berupah warisan materil (tanah dan benda pusaka lainnya) maupun berupah hak dalam suatu sistem pemerintahan adat. Secara teritorial *lewo* (kampung) atau yang menjadi kriteria *lewo* adalah memiliki benda-benda seperti *Nuba Nara* (perkampungan awal atau asli), *Nobo Namang* (bebatuan menhir sebagai tempat duduk tetua adat beserta halaman kecil tempat musyawara), dan *Kokar Bale* atau *Lango Bele* (rumah adat) yang semuanya berada di desa Kolilanang. Awalnya kolipetung adalah *Oring rian*, dalam bahasa indonesia di artikan sebagai pondok. Oring untuk masyarakat Lamaholot, Flores Timur, dijadikan sebagai tempat istirahat di kebun usai bekerja, bisa juga dijadikan sebagai tempat pertemuan dan diskusi, juga acara-acara adat tertentu. Orang pertama yang tinggal di tempat tersebut adalah Ola Subang yang merupakan *tuho wutung* (anak bungsu) dengan dua orang yang bermarga Tapo Bali bernama Kopong Liat dan dari marga Lakonawa bernama Boli Enga.

4. Pendidikan

Jumlah fasilitas atau sarana pendidikan yang ada di desa Kolipetung kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur adalah tiga (3) sarana pendidikan yaitu: satu buah bangunan taman kanak-kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), dan Madrasah Tsanawiyah (MTSs). Pembangunan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Kolipetung Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini cukup memadai khususnya pada tingkat TK, MIS dan MTS dominan 75% yang ada di dusun dua. Pada umumnya masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi mereka melanjutkan di kota kabupaten serta keluar provinsi. Selain memiliki jumlah sekolah yang dominan masyarakat Desa Kolipetung memiliki jumlah pendidikan yang cukup lumayan banyak dari jumlah keseluruhan terdapat 345.

Jumlah siswa laki-laki lebih tinggi di bandingkan perempuan hal ini disebabkan oleh kaum perempuan lebih banyak menika di usia muda ketimbang mengikuti proses jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

B. Hasil Penelitian

1. Komunikasi Pemerintah Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internal Marga Lewo Muda di Desa Kolipetung Kecamatan Adonara

Dalam proses mengidentifikasi komunikasi pemerintah dalam meredam segala persoalan yang terjadi di pusat desa Kolipetung, penulis perlu melakukan pendekatan yang mendalam guna dapat menemukan tujuan serta fakta-fakta valid. Hal ini juga dilakukan agar peneliti mampu menarik sebuah kesimpulan sesuai dengan bahan kajian peneliti. Adapun hasilnya dapat diketahui dari beberapa responden yang terlibat dalam Pemerintah Desa maupun stakeholder di Desa Kolipetung.

Pemerintahan desa Kolipetung yang memiliki pedoman kinerja UU RI No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa, di mana kerukunan segenap kehidupan masyarakat, keharmonisan tidak lepas dari adanya turut campur tangan oleh pemerintahan desa. Dengan demikian segala problematik sebagai motif konflik selalu dibarengi dengan adanya impian perdamaian baik oleh pemerintahan desa sendiri. Untuk itu konflik internal marga lewo muda di tengah kehidupan masyarakat desa Kolipetung adalah perlu untuk diatasi oleh pemerintahan desa guna mencapai keharmonisan dan kedamaian hidup bermasyarakat. Konflik ini merupakan hal yang krusial dikarenakan posisi marga lewo muda sebagai pemegang legitimasi desa adat yang artinya pemerintahan desa harus mengutamakan fokus pada dinamika tersebut, karena bagaimanapun kerenggangan internal marga lewo muda akan berdampak terhadap banyak aspek. Kata komunikasi berasal dari kata lain yakni *Communication* serta berasal dari kata *communis* yang mempunyai arti berbagi atau dengan kata lain menjadi milik bersama, maksudnya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini ketika seseorang menyampaikan pesan informasi kepada orang lain, maka harus dapat dipahami maksud dari komunikasi tersebut, sehingga komunikasi yang semacam itu mengandung makna yang komunikatif (Rajat, 2017). Komunikasi adalah proses penyampaian pesan antar manusia dalam rangka untuk bertukar informasi, pikiran atau perasaan (Soyomukti, 2012).

Menurut Aristoteles dalam (Mufid, 2009) yang dikutip dalam bukunya yang berjudul etika dan filsafat komunikasi bahwa komunikasi adalah suatu alat yang digunakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi dengan maksud memberikan suatu kesan positif kepada pendengar, sehingga pendengar menerima pesan itu dengan baik pula. Menurut Harold Laswell dalam (Solihat, 2016)

Widjaya, (2008) dalam bukunya yang berjudul komunikasi dan masyarakat mengemukakan bahwa komunikasi penyampaian pesan dan baik itu budaya, sosial, dan lainnya. beberapa

pengertian komunikasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah proses dan seni dalam menyampaikan pesan melalui komunikator sebagai pihak pengirim pesan kepada komunikan sebagai pihak penerima pesan untuk menciptakan tujuan dan frekuensi yang sama. Komunikasi merupakan rangkaian kegiatan manusia dimana dalam rangka ralasinya hubungan seorang dengan lainnya dapat terjadi. Manusia dilekatkan sebagai makhluk yang berbahasa, hal itu segenap demi terangkainya hubungan secara individual maupun kolektif yang eksis. Hal inipun oleh Sasa Djuarsa Sendjaja (2014) mengutip Berelson Dan Stainer (1964). Komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain sebagainya. Artinya eksistensi hubungan manusia kendati adanya hubungan itu lewat prasana-prasana yang menunjang tapi pada esensinya ialah merelasinya hubungan di antara jiwa manusia merupakan pengertian komunikasi.

Ahli ilmu pemerintahan mendefinisikan pemerintah sangat variatif, tergantung sudut pandang, keahlian, referensi, serta konsentrasi yang mendefinisikan. Berdasarkan pendapat Ndraha (2008:12) Sedangkan berkaitan dengan tujuan utama dibentuk pemerintah menurut Rasyid (2009:11) adalah demi untuk menjaga suatu sistem ketertiban guna dalam kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara aman dan tertip serta wajar. Dari pendapat di atas maka pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan bekerja sama dengan masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban secara wajar agar terciptanya kehidupan yang lebih baik pada masyarakat.

Dasar teori di atas menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah menjalankan berbagai tugas negara dengan sasaran akhir (*goal*) yaitu kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam negara tersebut. Tugas pemerintah akan dilakukan secara internal dan eksternal yang terermin dalam struktur serta proses pelaksanaan kerja secara operasional yang didasari sistem kerja, prosedur kerja dan tata kerja. Penekanan aktifitas kerja tersebut adalah pada kegiatan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan dikejakan sejumlah unit kerja serta sumber daya manusia dengan pembagian tugas-tugas tertentu.

Komunikasi pemerintah menurut Erliana Hasan dalam bukunya *Komunikasi Pemerintahan* adalah penyampain ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan Masyarakat (Erliana Hasan, 2005:95).

Proses komunikasi yang di bangun pemerintahan tentu bukan hanya berlaku untuk sesama aparatur untuk keefektivan kerja melainkan arah dan tujuan mulia kepada keutuhan, keamanan dan perdamaian maka sistem komunikasi pun berlaku untuk pemerintahan kepada masyarakat. hal ini Menurut malona (1997)

Menurut Ndraha (2001;621) bahwa konsep yang dipelajari sebagai bahan buat konstruksi komunikasi pemerintahan dari definisi komunikasi pemasaran adalah *target audiences* yang dalam komunikasi pemerintahan adalah pemerintah dan yang diperintah dalam berbagai posisi dan peranannya. Berdasarkan pengertian tersebut, komunikasi pemerintah adalah penyampaian informasi pemerintahan dari pemerintah kepada yang diperintah, sehingga yang diperintah mengerti dan memberikan respon sesuai yang diinginkan.

Proses komunikasi terdapat lima dimensi yaitu komunikator (pengirim informasi), pesan atau informasi yang disampaikan, media yang digunakan, penerima informasi, dan respon. Seitz (dalam Ndraha 2001:625) menyatakan pula bahwa komunikasi pemerintah meliputi unsur-unsur yakni komunikator (*actor x*), pesan (*messege*), saluran (*transmitter*),

penerima (*actor y*), dan respon (*respons*). Dari pengertian komunikasi tersebut, maka untuk mengukur tingkat komunikasi pemerintah.

Dari tinjauan beberapa definisi dari atas, peneliti melihat variabel yang berposisi sebagai stimulus dan tujuan konflik merupakan aspek kekuasaan maka dapat dikatakan bahwa konflik adalah bentuk konflik yang wajar yang diciptakan oleh individu atau kelompok yang berbeda kebangsaan (suku, bangsa, ras, agama, golongan) yang disebabkan oleh perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan mereka. Biasanya, konflik dimulai dengan hubungan antagonis antara dua atau lebih kelompok etnis (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan tertentu tetapi dipenuhi dengan pikiran, perasaan, atau tindakan. Bentuk konflik yang wajar ini diciptakan oleh individu atau kelompok etnis, baik intra maupun antar etnis, yang memiliki sikap, keyakinan, nilai atau kebutuhan yang berbeda.

Marga menurut Samin Batubara (2018), marga merupakan tanda darimana keluarga seorang itu berasal yang merupakan garis keturunan dari seorang ayah dimana marga diturunkan dari kakek hingga ke anak cucunya hingga sekarang. Dari pengertian dan uraian sebelumnya di atas, pembahasan tentang marga bersentral pada genealogi atau silsilah. Artinya marga tidak lepas dari konsepsi kekerabatan.

Menurut Sitokdana (2017), sistem kekerabatan berhubungan dengan unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan keturunan.

Teori konflik yang dikemukakan oleh Thomas yaitu konflik yang terjadi dikarenakan adanya dorongan dari diri manusia itu sendiri. Konflik terjadi karena ada tindakan yang terlewat, yaitu dalam tindakan pertama, manusia memenuhi keinginannya secara terus menerus dan kegelisahan setelah adanya kekuasaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik internal marga lewo muda di desa kolipetung dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan perspektif dan interpretasi terhadap sejarah.

C. Pembahasan

Berangkat dari hal-hal yang berbaur konflik internal marga peneliti meninjaunya berdasarkan pandangan Thomas Hobbes bahwasanya manusia merupakan sistem mekanis yang berjuang memperoleh kekuasaan atas orang lain, relevansi pandangan ini dalam dinamika internal marga sebagaimana perbedaan perspektif dan interpretasi terhadap sejarah yang berkaitan erat dengan genealogi sebagaimana menurut pandangan Samin Batubara (2018), marga merupakan tanda dari mana keluarga seseorang itu berasal dari garis keturunan ayah di mana marga itu diturunkan dari Kakek hingga ke anak cucunya. Silsilah ini dalam internal marga seperti yang sudah dicatat, di antaranya Payong Bane (Beruin atau Kakak) dan Ola Suban (Tuho Wutunatau Bungsu).

Perbedaan perspektif terhadap sejarah dan keberadaan lewo muda yang ada di desa Kolipetung berangkat dari genealogi atau silsilah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Ibrahim Ibe sebagai tokoh dari marga Lakonawa yang menyaksikan perselisihan internal marga lewo muda pada tahun 2020 yang diwawancarai pada 26 Mei 2023, bahwa perselisihan internal marga lewo muda secara spesifiknya dalam seremoni peletakan batu pertama pada pembangunan sekolah RA Nurul Muslim Kolipetung dikarenakan dari pihak keturunannya Payong Bane yang mempertahankan prinsip adat Lamaholot-Adonara (hukum adat yang berlaku, kebijaksanaan lokal) di mana secara genealogis patrilineal bahwa keturunan kakak memiliki hak dan wewenang serta kelayakan dalam peletakan batu itu.

Perbedaan perspektif berikutnya dari keturunan Ola Suban sebagai mana yang di

katakan oleh Bapak Zainuddin yang juga selaku tokoh dari marga Lakonawa yang turut menyaksikan konflik ini yang diwawancarai pada 24 Mei 2023 bahwa, Perselisihan kaka no ari (Adik dan Kakak) dengan mengkalifikasikan bahwa dari pihak Ola Suban mempertahankan perspektifnya bahwa dari keturunan Ola Suban yang meletakkan batu itu dikarenakan walau secara silsilah Ola Suban merupakan adik namun hak itu di karenakan sudah mendapatkan titah dan legitimasi dari Raja Kerajaan Adonara.

Artinya prinsip yang dipakai dari keturunannya Ola Suban bersifatmonarkis, diluar dari kebijaksanaan lokal. Sedangkan dari pihak keturunan kakak mempertahankan hukum adat dikarenakan dalam upaya memperoleh legitimasi dari Raja kerajaan Adonara, berangkat dari perintah kakak (Payong Bane) terhadap adik (Ola Suban) dalam nuansa kebudayaan lokal atau hukum adat yang berlaku dengan istilah *Leba Koda* (delegasi). Dengan demikian disinilah titik awal interpretasi terhadap sejarah dan keberadaan marga lewo muda.

Perbedaan perspektif dapat dilihat melalui pendekatan teori *Hermeneutika* dalam sistem interpretasi Paul Ricoeur, dalam pemikiran Paul Ricoeur *Hermeutika* merupakan teori yang mengenai aturan-aturan penafsiran yaitu aturan penafsiran terhadap teks tertentu. Penafsiran pada teks yang dimaksud dalam hal ini adalah interpretasi atas kehidupan yang ditentukan secara lingistik. Dialog yang akan diselenggarakan oleh pemerintahan desa kolipetung guna untukinterpretasi sampai pada konfesi dikarenakan dalam dialog merupakan bahasa yang dibicarakan pada konteks-konteks tertentu. Dalam sebuah artikelnnya bahwa teks adalah “*any discourse fixed by writing*” (Ed. Thomson, 1982) ; Terj. Syukri. 2006. Dengan istilah diskursus Paul Ricoeur merujuk kepada bahasa sebagai iven yaitu bahasa yang membicarakan sesuatu, bahasa yang saat digunakan untuk berkomunikasi. Sementara itu teks merupakan sebuah korpus otonomyang dicirikan oleh empat hal berikut :

1. Dalam sebuah teks makna yang terdapat pada yang dikatakan terlepas dari proses pengungkapannya, sedang dalam bahasa lisan kedua proses itu tidak dapat dilepaspisahkan.
2. Makna sebuah teks tidak lagi terikat pada pembicara sebagaimana bahasa lisan.
3. Sebuah teks tidak lagi terikat kepada konteks semula. Ia tidak terikat pada konteks asli tapi adanya unsur imajinar dalam setiap penafsir.
4. Demikian juga tidak lagi terikat kepada audiens awal sebagai mana bahasa lisan terikat kepada pendengar.

Akar perbedaan yang terjadi di antara marga lewo muda dan hal itu dianggap sebagai pemicu adanya konflik tentu berangkat dari perbedaan cara penafsiran terhadap pesan-pesan yang diwariskan secara turun temurun serta muatan dari pesan-pesan itu menyangkut sejarah. Pesan yang diwariskan itu disalurkan secara bahasa lisan sehingga adanya interpretasi diantara para generasi yang melalui cara yang berbeda-beda sehingga kesimpulan yang diambilpun berbeda.

Pemerintah desa kolipetung dengan mengagendakan dialog terbuka tentu memiliki atau bisa menawarkan solusi cara interpretasi yang tentu harus disepakati terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait. Namun dalam upaya penyelesaian itu layaknya dikembalikan kepada hukum adat yang berlaku di desa kolipetung. Jadi karena faktor yang memicu konflik adalah adanya perbedaan versi interpretasi, maka dialog yang sengaja direncanakan oleh pemerintahan desa guna untuk menyatukan perbedaan penafsiran tersebut serta mencapai pengakua dan kesepakatan dan pada ujungnya dikembalikan pada hukum adat.

Perseteruan antara Kakak dan Adik dalam internal marga lewo muda merupakan persoalan legitimasi, status quo, serta aspek kekuasaan lainnya dalam ruang ingkup teritorial yang ditinjau secara tradisional. Hal ini seperti juga yang di kemukakan oleh Karl Marx di mana konflik merupakan pertentangan antara sekmen-sekmen masyarakat untuk mempertahankan hal-hal yang bernilai. Dalam hal ini perseteruan internal marga bukan lagi

memperembutkan aset-aset tapi persoalan pengakuan akan kelayakan nilai-nilai luhur yang diwariskan yang juga merupakan hak dan keotentikan di antara keturunya Payong Bane dan Ola Suban.

Keberadaan marga lewo muda itu sendiri di desa Kolipetung dapat di katakan sebagai posisi esensial dikarenakan kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari sisi sosio-kultural tentang tata cara, tata krama, dan lainnya yang erkaitan dengan tata hukum adat bahkan wilayah teritorial ekonomi tentu membutuhkan adanya peran langsung dari marga lewo muda.

Legitimasi oleh para penduduk desa terhadap marga lewo muda adalah persoalan tiga hal di antaranya, geneologi, teritorial dan sejarah. Hal- hal inilah yang menjadi cikal bakal keberadaan lewo muda di desa Kolipetung bersifat esensial secara tradisional.

KESIMPULAN

Komunikasi Pemerintah Dalam ProsesPenyelesaian Konflik Intrnal Marga Lewo Muda di Desa Kolipetung, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Budi, R. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Makassar:Kretakupa print .

Cangara, H. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Liliweri,A.(2005).Prasangka Dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur.LKISPelangi Aksara,Yogyakarta.

Pace, R. W,& Faules, D. (2013). *Komunikasi Organisasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Lengkap Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014)

Raho,B.(2007).Teori SosiologiModern.Cetak Pertama,PrestasiPustaka Karya,Jakarta.

Riuma,M.Dkk.(2022).Pemerintahan AdatDan Konflik Internal Di Negeri Titi Wai Kecamatan Nisalaut Kabupaten MalukuTengah.Jurnal Ilmu Sosiologi

Romli, P. K. (2014). *Komunikasi OrganisasiLengkap edisi Revisi*. Jakarta:Grasindo.

Samin,B.(2018).Pelanggaran PerkawinanDalam satu Marga dat Batak Manggaling Di Desa MuaraPenyenggerahan,Sumatra Barat.AL-RISALA